

KETIMPANGAN GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN

**Oleh
Wayan Sudarta**

**Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Udayana**

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan ketimpangan gender di bidang pendidikan (pendidikan formal), yang ditelaah berdasarkan empat indikator yaitu angka buta huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi dan komposisi staf pengajar/kepala sekolah.

Hasil telaahan menunjukkan bahwa akses anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal lebih terbatas daripada anak laki-laki, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk menanggulangi masalah itu, diperlukan terobosan khusus, yang merupakan hasil kerja sama antar pihak terkait.

Kata kunci : ketimpangan, gender, pendidikan.

Pendahuluan

Ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi gender sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi objektif) di bidang pendidikan (Menteri Negara Peranan Wanita, 1998). Ketimpangan gender disebut juga permasalahan gender atau isu gender. Lebih lanjut kondisi normatif contohnya, kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi laki-laki (pria) dan perempuan (wanita) sama. Sedangkan kondisi objektif contohnya, semakin tinggi jenjang pendidikan (SLTP ke atas), jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan formal lebih sedikit daripada laki-laki. Pendidikan adalah proses penerusan nilai oleh pendidik (guru atau dosen) kepada anak didik (siswa atau mahasiswa). Dalam kaitannya dengan pendidikan, dapat dibedakan sebagai berikut. (1) Pendidikan formal, yakni pendidikan melalui bangku sekolah, direncanakan, sangat

dilembagakan dan bertata tingkat, seperti TK, SD dan seterusnya sampai perguruan tinggi. (2) Pendidikan non formal, yakni pendidikan di luar bangku sekolah, tetapi direncanakan, seperti penyuluhan, kursus-kursus, penataran dan lainnya. (3) Pendidikan informal, yakni pendidikan di luar bangku sekolah yang tidak direncanakan, tetapi berlangsung seumur hidup, seperti membaca surat kabar dan media cetak lainnya, mengikuti teladan dari orang tua, mengikuti perilaku dari sahabat atau kerabat, dan lain-lainnya. Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan adalah pendidikan formal.

Untuk menyukseskan pembangunan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, diperlukan pendidikan yang tinggi pula. Mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, berarti memanfaatkan sumber daya insani yang potensial dalam pembangunan dan merupakan tindakan yang efisien dan efektif. Apalagi didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi di bawah latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah akan merupakan beban bagi pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai arti yang sangat penting.

Di dalam UUD 1945 dan GBHN di antaranya diamanatkan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan (kondisi normatif). Namun kenyataan menunjukkan (kondisi objektif), seperti yang dikemukakan oleh Menteri Negara Peranan Wanita (1998), perempuan mengalami ketertinggalan yang lebih banyak daripada laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Ini artinya, masih terdapat ketimpangan gender di bidang pendidikan.

Bagaimana ketimpangan gender di bidang pendidikan dan apa faktor-faktor penentu ketimpangan gender di bidang pendidikan itu, kiranya menarik untuk ditelaah. Kedua pertanyaan tersebut akan terjawab melalui uraian atau penelaahan berikut ini.

Ketimpangan Gender

Dikemukakan oleh Bemmelen (2003^b) ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif: (1) angka buta huruf, (2) angka partisipasi sekolah, (3) pilihan bidang studi dan (4) komposisi staf pengajar dan kepala sekolah. Ketimpangan gender dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

(1) Angka Buta Huruf

Melek huruf merupakan syarat utama untuk berpartisipasi dalam kehidupan modern dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pada berbagai belahan dunia, di antaranya di negara Timur Tengah, Asia Tenggara dan Afrika Sub Sahara, masih dijumpai fakta yang mencengangkan mengenai kondisi perempuan. Anak perempuan atau wanita yang bersekolah (mengenyam pendidikan formal) lebih rendah 75 juta orang daripada anak laki-laki atau pria dan dari jumlah yang buta huruf ternyata dua pertiga adalah perempuan. Di Indonesia, jenjang pendidikan formal juga menunjukkan perbedaan gender yang signifikan. Tingkat pendidikan formal perempuan secara umum lebih rendah daripada laki-laki (Agung Ariani, 2002).

Di Bali, khususnya di pedesaan (daerah desa) masih banyak perempuan yang tidak lansia umurnya, yakni kelompok umur 10 s.d 44 tahun yang buta huruf jika dibandingkan dengan laki-laki dalam kelompok umur yang sama. Perempuan mencapai angka 11,1 %, sedangkan laki-laki 3,5 %. Namun di perkotaan (daerah kota) ketimpangan gender tidak setajam itu, yakni perempuan mencapai angka 3,6 % sedangkan laki-laki 1,3 % (Putra Astiti, 2002 dan Bemmelen, 2003^b).

(2) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Di Indonesia, semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin sedikit proporsi anak perempuan bersekolah. Sekadar sebagai suatu ilustrasi, dikemukakan oleh Rajab (2002) data tahun 1990 ratio gender (perbandingan antara laki-laki dengan perempuan) sebagai berikut. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) 100 : 95;

untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 100 : 89; untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 100 : 84 dan untuk Perguruan Tinggi 100 : 69.

Untuk di Bali, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat diikuti pada Tabel 1.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur (Tingkat Pendidikan) dan Jenis Kelamin di Bali Tahun 2000.

No.	Kelompok Umur (tahun)/ Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	7 s.d 12 / SD	100 (97,2)	100,3 (97,5)
2.	13 s.d 15 / SLTP	100 (88,0)	91,6 (80,6)
3.	16 s.d 18 / SLTA	100 (65,5)	93,3 (61,1)
4.	19 s.d 24 / Perguruan Tinggi	100 (15,2)	76,3 (11,6)

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase APS

Dari data yang tertuang dalam Tabel 1 dapat dipahami bahwa pada tahun 2000 di Bali sudah tidak ada lagi ketimpangan gender di tingkat SD (kelompok umur 7 s.d 12 tahun), begitu pula harapan kita untuk tahun-tahun yang akan datang (termasuk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tertinggi). Untuk tingkat SLTP dan SLTA masih terdapat ketimpangan gender, yakni untuk SLTP (kelompok umur 13 s.d 15 tahun) setiap 100 orang laki-laki terdapat 91,6 orang perempuan dan untuk SLTA (kelompok umur 16 s.d 18 tahun) setiap 100 orang laki-laki dijumpai 93,3 orang perempuan. Ketimpangan gender yang menonjol terlihat di Perguruan Tinggi (kelompok umur 19 s.d 24 tahun), setiap 100 orang laki-laki dijumpai 76,3 orang perempuan atau setiap 1.000 orang laki-laki dijumpai 763 orang perempuan.

Kiranya ada tiga alasan pokok yang menyebabkan ketimpangan gender tersebut. (1) Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin terbatas jumlah sekolah. Untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi (SLTP ke atas) yang

umumnya terkonsentrasi di kota, baik laki-laki maupun perempuan harus pergi ke luar desa atau meninggalkan desa dengan jarak yang relatif jauh. Hal ini memberatkan orang tua terhadap anak perempuan yang bersekolah jauh, karena akan merasa kehilangan tenaga kerja yang membantu di rumah. (2) Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan. Bagi keluarga atau rumah tangga yang berlatar belakang ekonomi lemah (miskin), umumnya lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, karena tenaga kerja perempuan dibutuhkan di rumah. (3) Investasi pendidikan formal bagi perempuan kerap kali tidak banyak dirasakan oleh orang tua, karena anak perempuan setelah menikah akan menjadi anggota keluarga suaminya (Suleeman, dalam TO. Ihromi 1995).

(3) Pilihan Bidang Studi

Ketimpangan gender terlihat juga dalam pilihan bidang studi. Hal ini dapat dibuktikan pada sekolah kejuruan, seperti misalnya Sekolah Kepandaian Puteri (SKP), yakni suatu sekolah khusus untuk anak perempuan, Sekolah Teknik Menengah (STM) umumnya untuk anak laki-laki dan sebagainya. Dalam penjurusan di tingkat SLTA, umumnya anak perempuan lebih banyak mengisi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan anak laki-laki lebih banyak mengisi jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal ini rupanya tidak terlepas dari stereotipe gender, anak perempuan lebih banyak membantu di rumah dengan waktu belajar yang lebih sedikit daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak dipacu belajar dan dibebaskan dari tugas yang berkaitan dengan pekerjaan urusan rumah tangga.

Berkaitan dengan pilihan fakultas dan jurusan di Perguruan Tinggi, dinyatakan oleh Suleeman (dalam T O. Ihromi, 1995), bahwa proporsi laki-laki dan perempuan di fakultas dan jurusan di Universitas Indonesia (dalam tahun 1992/1993) menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Di samping itu, dinyatakan oleh Agung Ariani (2002) umumnya perempuan memilih sekolah yang penyelesaian pendidikannya memerlukan waktu pendek dan cepat bisa bekerja. Sebagai alasannya

di antaranya, untuk menunjang ekonomi rumah tangga dan untuk biaya melanjutkan studi saudara laki-lakinya.

(4) Komposisi Staf Pengajar dan Kepala Sekolah

Ketimpangan gender dapat pula diketahui di kalangan staf pengajar dan kepala sekolah. Walaupun dalam tulisan ini tidak ada data kuantitatif, secara kualitatif kenyataan menunjukkan bahwa untuk Sekolah Taman Kanak-kanak didominasi oleh tenaga pengajar perempuan. Sedangkan untuk SD sampai dengan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi, tenaga pengajar laki-laki lebih dominan daripada tenaga pengajar perempuan. Kecendrungan yang serupa juga terlihat di kalangan kepala sekolah dan pimpinan universitas.

Faktor-faktor Penentu Ketimpangan Gender

Faktor-faktor penentu ketimpangan gender di bidang pendidikan meliputi (1) masalah lama, (2) nilai gender yang dianut oleh masyarakat, (3) nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, (4) nilai gender yang ditanamkan oleh guru dan (5) kebijakan yang bias gender. Masing-masing faktor itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Masalah Lama

Sejak dulu Angka Partisipasi Sekolah anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan terfokus pada jenis pendidikan tertentu (Bemmelen, 2003^a). Memang dilihat dari latar belakang sejarah, sejak dulu dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi, perempuan selalu lebih sulit mendapatkan akses ke dalam pendidikan formal. Padahal, arti penting pendidikan formal bagi perempuan sudah dirasakan sejak lama. Hal ini sejalan dengan pemikiran R.A Kartini melalui perjuangan emansipasinya, yakni menginginkan pendidikan formal perempuan yang sama dengan laki-laki. Dirasakan hanya melalui pendidikan formal, perempuan akan bisa berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Menurut R.A. Kartini, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama, oleh karena itu perempuan akan bisa melangkah lebih maju apabila diberikan peluang yang sama dengan laki-laki. Dalam pikiran

R.A Kartini, pendidikan formal akan dapat menetralkan perbedaan sifat kelakian dan keperempuanan yang merupakan hasil rekayasa budaya itu. Pendidikan formal diyakininya dapat menghilangkan perbedaan prasangka itu, sehingga yang tinggal hanyalah kodrati biologisnya.

(2) Nilai Gender yang Dianut oleh Masyarakat

Berkaitan dengan pendidikan formal, ada dua nilai gender yang menonjol yang masih berlaku di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. “Untuk apa anak perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia ke dapur juga”. “Untuk apa perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia akan menjadi milik orang lain juga”.

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti di Bali, nilai gender tersebut tampak lebih menonjol. Pada masyarakat yang berpegang pada sistem kekerabatan itu, lebih mengutamakan hubungan keluarga dengan garis laki-laki (ayah) daripada hubungan keluarga dengan garis perempuan (ibu). Dengan demikian, cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan di dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

(3) Nilai dan Peran Gender yang Terdapat dalam Buku Ajar

Contoh yang klasik mengenai sosialisasi gender melalui buku ajar di antaranya sebagai berikut. “Ibu memasak di dapur, Bapak membaca koran”. Ibu berbelanja ke pasar, Bapak mencangkul di sawah”.

Bentuk seksisme lain; gambar-gambar lebih sering menampilkan anak laki-laki jika dibandingkan dengan anak perempuan dan dalam kegiatan yang lebih bervariasi.

(4) Nilai Gender yang Ditanamkan oleh Guru

Guru merupakan “role model” yang sangat penting di luar lingkungan keluarga anak. Disadari atau tidak, setiap orang termasuk guru mempunyai persepsi tentang peran gender yang pantas. Persepsi itu akan disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada murid (Bemmelen, 2003^b). Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang membedakan.

- a. Dalam hal-hal tertentu guru lebih banyak berinteraksi dengan anak laki-laki, tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya guru lebih banyak berinteraksi dengan anak perempuan.
- b. Dalam memberikan mainan di Taman Kanak-kanak; anak laki-laki diberikan mainan mobil, sedangkan anak perempuan diberikan mainan boneka.
- c. Dalam memberikan pujian; anak laki-laki dipuji karena kemampuan intelektualnya, sedangkan anak perempuan dipuji karena kerapiannya.
- d. Anak perempuan lebih sering disuruh untuk menjalankan peran membersihkan sesuatu atau meladeni sesuatu daripada anak laki-laki.
- e. Guru lebih sering memberikan pujian atau teguran kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Ini artinya, anak laki-laki lebih banyak mendapat perhatian daripada anak perempuan.

(5). Kebijakan yang bias gender

Terutama di tingkat SLTA (SMU, SMK), terdapat kebijakan yang bias gender seperti (a) anak perempuan yang hamil (karena kecelakaan) dikeluarkan dari sekolah, sedangkan anak laki-laki yang menghamilinya tidak kena sanksi apapun, (b) tidak dibenarkan anak perempuan yang sudah menikah untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan di tingkat SLTP atau SLTA.

Kebijakan pengangkatan guru atau kepala sekolah khususnya di tingkat SD, SLTP dan SLTA yang lebih berorientasi kepada laki-laki dan kebijakan pengangkatan guru dan kepala TK di TK yang lebih berorientasi kepada perempuan, juga merupakan kebijakan yang bias gender. Kebijakan itu merupakan pemicu ketimpangan gender, karena berimplikasi kepada komposisi personalia pengajar dan kepala sekolah.

Berkaitan dengan faktor penentu ketimpangan gender, selain faktor penentu yang telah diuraikan tersebut, penting pula diperhatikan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan kurangnya fasilitas pendidikan. Bagi keluarga yang berlatar belakang ekonomi lemah, cenderung tidak memberikan anak perempuan untuk memanfaatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Anak

perempuan dinomorduakan dalam mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal. Apabila terjadi hal yang demikian, maka pemerintah yang memiliki komitmen terhadap peraturan wajib belajar, berkewajiban untuk mengimbangnya dengan kebijakan yang tepat. Di desa-desa atau daerah-daerah terpencil khususnya, fasilitas pendidikan masih kurang. Keadaan ini berpengaruh buruk terhadap akses anak desa untuk mengikuti pendidikan formal. Jika pada suatu desa tidak ada SD atau SLTP umpamanya, maka anak-anak terpaksa mengikuti pendidikan formal di luar desa, yakni di desa lain atau di kota terdekat yang membutuhkan waktu dan biaya transportasi khusus. Dalam keadaan seperti itu, orang tua cenderung tidak mengizinkan anak perempuan bersekolah, apalagi sekolah terdekat berjarak jauh. Hal ini terutama terjadi di kalangan keluarga yang tidak mampu secara ekonomis.

Penutup

Demikianlah informasi tentang ketimpangan gender di bidang pendidikan (pendidikan formal). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akses anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal lebih terbatas jika dibandingkan dengan anak laki-laki, yang disebabkan oleh beragam faktor. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan terobosan khusus, yang merupakan hasil kerja sama antar pihak terkait, yakni orang tua, guru, masyarakat, komite sekolah, dinas pendidikan setempat dan departemen pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Agung Ariani, I Gusti Ayu. 2002. Mengenal Konsep Gender (Permasalahan dan Implementasinya dalam Pendidikan).
- Bemmelen, Sita Van. 2003^a. Konsep Gender dan Isu Gender di Bidang Pendidikan. Semiloka Gender untuk Para Guru/Pendidik Kabupaten/Kota se Bali.
- Bemmelen, Sita Van. 2003^b. Isu Gender di Bidang Pendidikan. Semiloka Gender untuk Para Guru Kabupaten/Kota se Bali.
- Menteri Negara Peranan Wanita. 1998. Jender dan Permasalahannya. Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. Jakarta.

- Putra Astiti, Tjok Istri. 2002. Identifikasi Permasalahan Gender dalam Pendidikan. Materi Sosialisasi Gender untuk Para Guru/Pendidik Kabupaten/Kota se Bali yang Diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Bekerja Sama dengan BKPP PEMDA Bali di Balai Penataran Guru Denpasar.
- Rajab, Budi. 2002. Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kedudukan Perempuan. Jurnal Perempuan No. 23. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Suleman, Evelyn. 1995. Pendidikan Wanita Indonesia. Dalam T O. Ihromi (Penyunting). Kajian Wanita Dalam Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.